

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI KAWASAN MEBIDANGRO

Pendi Dewanto*, Rujiman**, dan Agus Suriadi**

*Alumni PWD SPs USU/BPS Sumatera Utara

** Dosen PWD SPs USU

Abstract: *The purpose of this study was to analyze the influence of economic growth and income disparity on poverty eradication in Mebidangro area, to find out the level of economic growth influence whether it is pro-poor or anti-poor and to find out the sectors influencing the poverty eradication. The panel data obtained from the four districts/cities in Mebidangro area from 2004 to 2011 were analyzed. The result of this study showed that the economic growth and income disparity in Mebidangro area had negative influence on poverty level. If viewed based on the influence of elasticity value of net poverty on the economic growth, the economic growth can minimize the poverty but income disparity became a constraint or minimized the effectiveness of economic growth in poverty eradication. The economic growth in Mebidangro area for 2004-2011 was not anti-poor that marked with the index value of pro-poor growth of -7.824. The sectors dominantly influencing poverty eradication were agriculture, mining and quarrying, processing industry, electricity, gas and clean water, trade, hotels and restaurants, transportation and communication.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap pengentasan kemiskinan di kawasan Mebidangro, mengetahui tingkatan pengaruh pertumbuhan ekonomi apakah *pro poor* atau *anti poor* serta mengetahui sektor-sektor yang memiliki pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Analisa dilakukan melalui data panel empat kabupaten/kota yang termasuk di kawasan Mebidangro pada periode 2004-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di kawasan Mebidangro berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan dilihat dari nilai elastisitas netto kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan kemiskinan tetapi ketimpangan pendapatan menjadi penghambat atau mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Mebidangro selama tahun 2004-2011 bersifat tidak pro kemiskinan (*anti poor*) yang ditandai dengan angka indeks *pro-poor growth* sebesar -7,824. Sedangkan sektor-sektor yang berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan adalah sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran, dan angkutan dan komunikasi.

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan

pemberantasan kemiskinan yang absolut (Todaro, 2000).

Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan adalah isu-isu yang selalu menarik untuk dipelajari. Para ahli mencurahkan perhatian yang cukup besar terhadap hal ini (Lin, 2003; Bourguignon, 2004; Ravallion, 2005;

dan Warr, 2000, 2006). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memperbesar kapasitas ekonomi (Produk Domestik Bruto-PDB). Diharapkan dengan PDB yang tinggi maka akan tercipta *trickle down effect* sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Isu tentang pertumbuhan ekonomi, ketidakmerataan pendapatan dan kemiskinan telah lama menjadi fokus utama pembangunan ekonomi baik di tingkat global maupun nasional. Analisa hubungan segitiga antara ketiga hal tersebut telah menjadi bahan perdebatan yang panjang dan sangat menarik terutama pada pemilihan strategi pembangunan ekonomi dalam upaya pengentasan kemiskinan. *Pertama*, apakah lebih mendahulukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengesampingkan pembagian distribusi pendapatan. *Kedua*, apakah lebih mengutamakan distribusi pendapatan yang lebih merata tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, adanya permasalahan kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan juga akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Selain itu, kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan juga akan memberikan dampak instabilitas sosial, ketidakpastian, dan tragedi kemanusiaan seperti kelaparan, tingkat kesehatan yang rendah dan gizi buruk. Bila keadaan tersebut terus berlanjut pada akhirnya akan mengganggu stabilitas ekonomi makro dan kelangsungan pemerintahan yang ada.

Menurut Arsyad (1999) dalam Hajiji (2010) tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan, masih banyak penduduk yang memiliki pendapatan dibawah standar kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan ekonomi gagal untuk mengurangi bahkan menghilangkan besarnya kemiskinan absolut. Jadi pertumbuhan PDB yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dengan kata lain bahwa apa yang disebut dengan "*Trickle Down Effects*" atau efek cucuran kebawah dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan bahkan berjalan cenderung sangat lambat.

Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs) yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, yang merupakan hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000. Salah satu target dari tujuan tersebut adalah menurunkan persentase penduduk yang pendapatannya kurang dari 1 dolar sehari sebanyak 50 persen tahun 1990-2015 dengan indikator proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional.

Di Indonesia, pada awal masa pemerintahan Orde Baru para pembuat kebijakan dan perencana pembangunan sangat percaya akan adanya *trickle down effect* (Tambunan, 2003). Pembangunan hanya dipusatkan di Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya dan hanya pada sektor-sektor tertentu saja. Mereka percaya bahwa nantinya hasil dari pembangunan itu akan menetes ke sektor-sektor dan wilayah lainnya di Indonesia.

Mebidangro merupakan salah satu kawasan metropolitan di Indonesia yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, terdiri atas Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang dan sebagian Kabupaten Karo (4 kecamatan) yang ditetapkan melalui Perpres No. 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Metropolitan Mebidangro. Kebijakan Tata Ruang Nasional menempatkan Kawasan Mebidangro sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sekaligus sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan fokus pengembangan kegiatan ekonomi. Kawasan Mebidangro berada di Wilayah Sumatera Bagian Utara yang memiliki kedudukan strategis terhadap pengembangan Segitiga Ekonomi Regional Indonesia - Thailand - Singapura (IMT-GT). Posisinya yang strategis ini menjadi perhatian penting dalam pengembangan kawasan Mebidangro ke depan.

Kebijakan dalam Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro meliputi:

1. Pengembangan dan pemantapan fungsi Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagai pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien serta mampu bersaing secara internasional terutama

- dalam kerja sama ekonomi subregional Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand.
2. Peningkatan akses pelayanan pusat-pusat kegiatan perkotaan Mebidangro sebagai pembentuk struktur ruang perkotaan dan penggerak utama pengembangan wilayah Sumatera bagian utara.
 3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta prasarana perkotaan Kawasan Perkotaan Mebidangro yang merata dan terpadu secara internasional, nasional, dan regional.
 4. Peningkatan keterpaduan antar kegiatan budi daya serta keseimbangan antara perkotaan dan perdesaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 5. Peningkatan fungsi, kuantitas, dan kualitas RTH dan kawasan lindung lainnya di Kawasan Perkotaan Mebidangro.

Pertumbuhan Ekonomi

Konsep dasar pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan hasil kegiatan ekonomi seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah, atau bisa juga dikatakan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Regional Neto (PDRN), dimana produk atau hasil kegiatan ekonomi dari seluruh unit ekonomi domestik adalah dalam wilayah kekuasaan atau administratif seperti negara, provinsi, atau kabupaten.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu sasaran pembangunan. Pembangunan dalam arti luas mencakup aspek kehidupan baik ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan lain sebagainya. Pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita, karena kenaikan merupakan penerimaan dan timbulnya dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Laju pembangunan ekonomi suatu negara diukur dengan menggunakan tingkat pertumbuhan GDP/GNP (Arsyad, 1997 dalam Hajiji, 2010).

Kemiskinan

Fenomena kemiskinan merupakan sesuatu yang kompleks, dalam arti tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi saja tetapi juga dengan dimensi-dimensi lain diluar ekonomi. Namun selama ini kemiskinan lebih sering dikonsepsikan dalam konteks ketidakcukupan pendapatan dan harta (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan, yang mana semuanya berada dalam lingkup dimensi ekonomi.

Menurut Sen (1985) kemiskinan adalah kegagalan untuk berfungsinya beberapa kapabilitas dasar atau dengan perkataan lain seseorang dikatakan miskin jika kekurangan kesempatan untuk mencapai/mendapatkan kapabilitas dasar ini. Sen (1995) menyatakan bahwa kemiskinan jangan dianggap hanya sebagai pendapatan rendah (*low income*), tetapi harus dianggap sebagai ketidakmampuan kapabilitas (*capability handicap*).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum dikategorikan sebagai penduduk miskin. Nilai garis kemiskinan yang digunakan mengacu pada kebutuhan minimum 2.100 kkal per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi kebutuhan dasar untuk papan, sandang, sekolah, transportasi, serta kebutuhan rumahtangga dan individu yang mendasar lainnya. Besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan tersebut disebut garis kemiskinan (BPS, 2010).

Metode yang digunakan untuk menghitung Garis Kemiskinan terdiri atas dua komponen utama yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori perkapita perhari. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai *property rights* (Glaeser, 2006).

Alesina dan Rodrik (1994) dalam Hajiji (2010) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan menghambat pertumbuhan. Hal ini karena ketimpangan menyebabkan kebijakan redistribusi pendapatan yang tentunya akan mahal.

Beberapa ukuran ketimpangan yang sering digunakan antara lain: Indeks *Gini*, Indeks *Theil*, dan ukuran ketimpangan dari Bank Dunia. Dalam penelitian ini ukuran ketimpangan yang digunakan adalah Indeks *Gini*.

Indeks *Gini* adalah murni ukuran statistik untuk variabilitas dan ukuran normatif untuk mengukur ketimpangan. Wodon dan Yitzhaki (2002) mengungkapkan kelebihan utama Indeks *Gini*, yaitu:

- Sebagai ukuran statistik untuk variabilitas, Indeks *Gini* bisa digunakan untuk menghitung pendapatan negatif, ini adalah salah satu sifat yang tidak dimiliki oleh sebagian ukuran ketimpangan
- Indeks *Gini* juga bisa digambarkan secara geometris sehingga lebih mudah untuk diamati dan dianalisis
- Indeks *Gini* memiliki dasar teori yang kuat. Sebagai indeks normatif, Indeks *Gini* bisa merepresentasikan teori kemiskinan relatif. Indeks *Gini* juga bisa diturunkan sebagai ukuran ketimpangan berdasarkan aksioma-aksioma keadilan sosial

Pro Poor Growth Index (PPGI)

Kakwani dan Pernia (2000) menyatakan bahwa konsep *pro poor growth* pertama kali diperkenalkan pada era 1950 an dan kemudian dipertegas oleh Chenery (1974). Konsep *pro poor growth* juga secara implisit dijelaskan dalam World Development Report 1990 (World Bank, 1990).

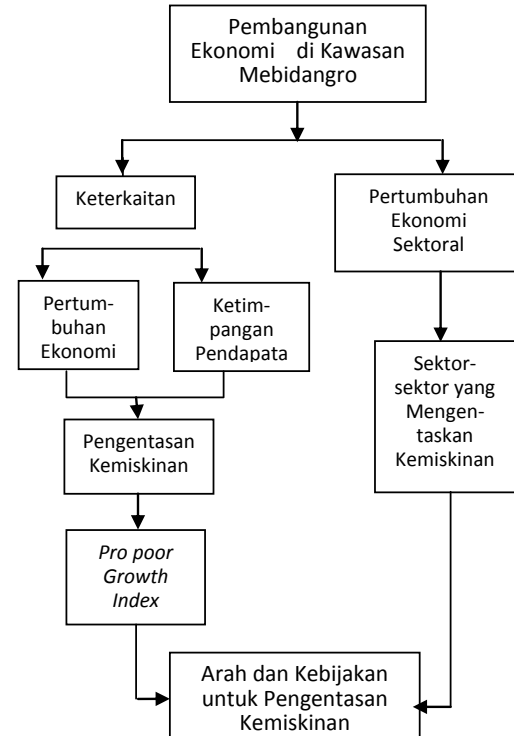
Pro poor growth index adalah suatu

ukuran untuk melihat sejauh mana pertumbuhan ekonomi bisa disebut *pro poor*. Indeks ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

- Data yang diperlukan tidak terlalu sulit, sehingga mudah dihitung
- Indeks ini dapat digunakan untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan *pro poor* pada tingkat makro dan mikro
- Indeks ini bisa dihitung menurut sektor ekonomi ataupun wilayah

Berdasarkan perumusan masalah diatas, secara garis besarnya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap pengentasan kemiskinan di kawasan Mebidangro.
2. Mengetahui tingkatan pengaruh pertumbuhan ekonomi di kawasan Mebidangro apakah *pro poor* atau *anti poor*.
3. Mengetahui sektor-sektor yang memiliki pengaruh yang besar terhadap pengentasan kemiskinan di kawasan Mebidangro.



Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian

METODE

Penelitian ini menitikberatkan pada keterkaitan antara tiga variabel (pertumbuhan

ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan) yang dianggap memunyai hubungan diantara ketiga variabel tersebut atau dua diantara ketiga variabel tersebut. Ruang lingkup analisis penelitian ini adalah kawasan Mebidangro dalam periode waktu tahun 2004-2011. Untuk Kabupaten Karo, walaupun hanya 4 (empat) kecamatan yang masuk dalam kawasan Mebidangro, namun karena keterbatasan data, maka data yang digunakan adalah data seluruh Kabupaten Karo.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari BPS. Data yang digunakan antara lain Jumlah Penduduk, PDRB kabupaten/kota se Sumatera Utara, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Indeks *Gini*, dan angka kemiskinan, serta beberapa data makro sosial lainnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Analisis Deskriptif, untuk melihat gambaran pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap pengentasan kemiskinan; (2) Analisis Regresi Data Panel, untuk melihat arah dan besaran pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap pengentasan kemiskinan; (3) *Pro poor growth indeks* (PPGI), untuk melihat tingkatan pengaruh pertumbuhan ekonomi di kawasan Mebidangro apakah *pro poor* atau *anti poor*

HASIL

Kawasan Mebidangro menjadi sangat strategis karena merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, pusat industri, perdagangan dan jasa, dan merupakan kawasan yang padat pemukiman. Selain itu terdapat juga Bandara Internasional Kuala Namu dan Pelabuhan Belawan yang menjadi pintu masuk utama ke Sumatera Utara.

Wilayah yang termasuk dalam kawasan Mebidangro adalah: Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan sebagian Kabupaten Karo (Kecamatan Merdeka, Kecamatan Berastagi, Kecamatan Barus Jahe, dan Kecamatan Dolat Rakyat).

Luas wilayah kawasan Mebidangro 3.026,98 km², yang terdiri dari 52 Kecamatan dan 627

desa/kelurahan. Kabupaten Deli Serdang merupakan wilayah paling luas di kawasan Mebidangro yang mencapai 2.497,72 km² atau hampir 83 persen dari total luas Mebidangro. Sedangkan Kota Binjai merupakan wilayah yang terkecil dengan luas wilayah hanya 90,23 km² atau sekitar 2,98 persen.

Salah satu aset berharga dalam pembangunan wilayah adalah penduduk, jumlah penduduk dapat menjadi faktor pendorong dalam pembangunan di suatu wilayah jika dikelola dengan baik dan benar. Dengan kualitas penduduk yang baik terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan, maka pembangunan suatu wilayah akan terpacu. karena keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Jumlah penduduk di kawasan Mebidangro pada tahun 2004 sebanyak 4,08 juta jiwa, angka ini meningkat pada tahun 2011 menjadi 4,53 juta jiwa atau bertambah sebanyak 450 ribu jiwa. Jika dibandingkan dengan total penduduk Provinsi Sumatera Utara, maka persentase penduduk di kawasan Mebidangro pada tahun 2004 sebesar 33,65 persen dan angka ini meningkat menjadi 34,55 persen pada tahun 2011.

Hal ini terjadi karena kawasan Mebidangro memang wilayah yang menjadi tujuan perpindahan penduduk di Provinsi Sumatera Utara karena merupakan pusat segala kegiatan, baik pusat pemerintahan maupun pusat perekonomian. Medan, Deli Serdang, dan Binjai merupakan pusat perdagangan dan jasa, kawasan industri, yang tentu saja memunculkan lapangan pekerjaan bagi para penduduk yang datang.

Tabel 1. Persentase penduduk menurut ijazah tertinggi dan angka melek huruf Tahun 2004 dan 2011

No.	Indikator/Wilayah	2004	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tamat SD		
	Medan	21,5	19,1
	Binjai	22,8	22,7
	Deli Serdang	26,0	24,0
	Karo	25,5	24,5
	Sumatera Utara	28,0	25,9
2.	Tamat SMP		
	Medan	23,4	20,2
	Binjai	24,4	22,8
	Deli Serdang	24,3	22,8

Karo	29,3 ^a	24,3 ^a
Sumatera Utara	23,9^a	21,7^a
3. Tamat SMA keatas		
Medan	42,3 ^a	48,5 ^a
Binjai	38,3 ^a	42,9 ^a
Deli Serdang	28,2 ^a	33,9 ^a
Karo	27,4 ^a	32,6 ^a
Sumatera Utara	26,1^a	31,1^a
4. Angka Melek Huruf		
Medan	99,1 ^a	99,3 ^a
Binjai	98,7 ^a	99,2 ^a
Deli Serdang	97,1 ^a	98,6 ^a
Karo	97,6 ^a	98,7 ^a
Sumatera Utara	96,8^a	97,4^a

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk yang menamatkan pendidikannya menurut tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka kualitas sumber daya manusianya juga akan semakin meningkat. Persentase penduduk di Mebidangro yang menamatkan pendidikannya pada tingkat SMA keatas meningkat dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2011. Pada Tabel 1 terlihat bahwa untuk wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo persentase penduduk yang tamat SMA keatas tahun 2011 rata-rata lebih tinggi dibanding tahun 2004, dan lebih tinggi dari rata-rata Sumatera Utara.

Persentase penduduk yang melek huruf tahun 2011 juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2011 untuk semua daerah di kawasan Mebidangro. Kota Medan masih menjadi yang tertinggi yaitu sebesar 99,38 persen, hal ini dimaklumi karena fasilitas pendidikan di Kota Medan semua tersedia, mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa secara garis besar penduduk di kawasan Mebidangro mendapat kemudahan untuk mengakses pendidikan serta kemampuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Pada tahun 2011 angka harapan hidup penduduk Mebidangro lebih tinggi dari rata-rata Sumatera Utara yang sebesar 69,7 tahun. Kota Medan sebesar 72,1 tahun, Kota Binjai sebesar 71,9 tahun, Kabupaten Deli Serdang sebesar 70,9 tahun, dan Kabupaten Karo 72,3 tahun. Jika dibandingkan dengan tahun 2004, angka

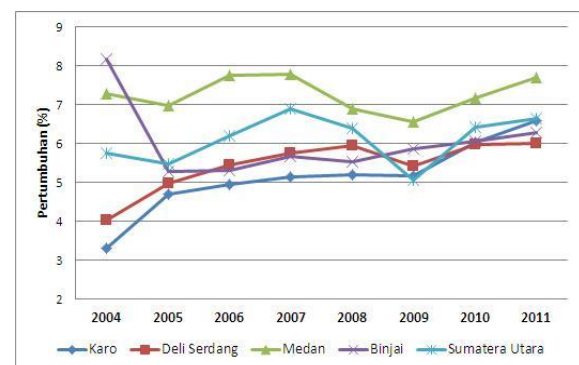
tersebut semuanya mengalami peningkatan, artinya terjadi perbaikan taraf kesehatan penduduk dari tahun 2004 hingga 2011 seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di kawasan Mebidangro.

Tabel 2. Angka harapan hidup dan angka kematian bayi di Mebidangro dan Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup		Angka Kematian Bayi	
	2004	2011	2004	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Medan	69,9	72,1	23,0	11,4
Binjai	70,1	71,9	25,2	15,6
Deli Serdang	68,0	70,9	32,0	20,4
Karo	70,1	72,3	18,6	10,6
Sumatera Utara	68,2	69,7	36,7	25,6

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Angka kematian bayi di kawasan Mebidangro rata-rata mengalami penurunan dari tahun 2004 hingga 2008, dan angka tersebut masih lebih baik dibanding rata-rata angka kematian bayi di Sumatera Utara. Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan angka kematian bayi yang cukup signifikan pada periode itu. Angka kematian bayi di Kota Medan menurun dari 23 pada tahun 2004 menjadi hanya 11 pada tahun 2008. Sedangkan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 32 pada tahun 2004 menjadi 20 pada tahun 2008.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambar 2. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Mebidangro dan Sumatera Utara Tahun 2004-2011

Pertumbuhan ekonomi di wilayah yang termasuk kawasan Mebidangro pada rata-rata mengalami peningkatan dari tahun 2004 sampai tahun 2011, kecuali Kota Binjai yang mengalami penurunan (laju perekonomian tetap tumbuh namun melambat). Pada tahun 2004 angka pertumbuhan ekonomi di Kota Binjai cukup tinggi yang mencapai 8,17 persen, kemudian turun pada tahun 2005 menjadi 5,28 persen, selanjutnya terus mengalami peningkatan hingga mencapai 6,28 persen pada tahun 2011.

Perekonomian kawasan Mebidangro sebagian besar ditopang oleh dua sektor utama yaitu sektor industri pengolahan dengan kontribusi yang mencapai 24,71 persen dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 23,68 persen. Sektor lainnya yang kontribusinya diatas 10 persen adalah sektor pengangkutan dan komunikasi (12,80%), sektor jasa-jasa (10,98%), dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan (10,26%). Sedangkan empat sektor lainnya yaitu sektor pertanian, sektor bangunan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor pertambangan dan penggalian totalnya hanya menyumbang sekitar 17 persen.

Ketimpangan pendapatan adalah gambaran dari sebuah pendistribusian pendapatan masyarakat di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Salah satu indikator standard ketimpangan ekonomi adalah indeks Gini. Untuk daerah di kawasan Mebidangro, distribusi pendapatan tahun 2004 dan 2011 relatif merata (ketidakmerataan rendah) dengan indeks Gini dibawah 0,300, terjadi variasi antara 0,186 hingga 0,254. Peningkatan ketimpangan pendapatan hanya terjadi di Kota Binjai dari 0,190 menjadi 0,250, sedangkan pada tiga daerah lainnya mengalami penurunan dengan penurunan terbesar terjadi di Kota Medan dari 0,254 menjadi 0,202.

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang harus segera ditangani dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Usaha-usaha tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan juga menaikkan martabat dan taraf hidup masyarakat. Persentase penduduk miskin di

kawasan Mebidangro pada tahun 2011 rata-rata di bawah 10 persen, yaitu Kota Medan sebesar 9,63 persen, Kota Binjai sebesar 7,00 persen, dan Kabupaten Deli Serdang sebesar 5,10 persen, sedangkan Kabupaten Karo masih diatas 10 persen yaitu sebesar 10,49 persen. Dilihat perkembangannya, tahun 2011 Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo berhasil menekan angka kemiskinan dibanding tahun 2004, sedangkan Kota Medan dan Kota Binjai justru mengalami peningkatan angka kemiskinan dibanding tahun 2004 walaupun angkanya masih dibawah 10 persen.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dihitung dengan model yang dikembangkan oleh Wodon (1999) sebagai berikut:

$$\log G_{it} = \alpha_i + \beta_i \log Y_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots(1)$$

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari nilai elastisitas ketimpangan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Model yang digunakan adalah model double log, sehingga parameter β yang di dapat melambangkan elastisitas ketimpangan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai β tersebut bisa bernilai bisa positif atau negatif. Jika nilai β bertanda positif, artinya peningkatan PDRB konstan sebesar 1 persen akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar β persen. Jika nilai β bertanda negatif, artinya peningkatan PDRB konstan sebesar 1 persen akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar β persen.

Model 1 diregresi dengan menggunakan model *fixed effect*, dengan *weighting cross section weights* dan *white heteroscedasticity*. Model dengan *fixed effect* dipilih setelah melalui pengujian yang menyimpulkan bahwa model dengan *individual effect* lebih baik daripada dengan *common effect* (Uji F). Pengujian dengan uji Hausman juga menyimpulkan bahwa *fixed effect* lebih baik daripada *random effect*. Sedangkan *weighting* dengan *cross section weights* dan *white heteroscedasticity* karena model *fixed effect* mengandung heteroskedastisitas.

Tabel 3. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	317762.5	212539.6	1.4951	0.1465
LOGPDRB?	-4.5852	2.547867	-1.7996**	0.0831
R-squared	0.290870			
Adjusted R-squared	0.185814			
S.E. of regression	5656.312			
F-statistic	2.768704*			
Prob(F-statistic)	0.047573			

* Signifikan pada taraf nyata 5 %

** Signifikan pada taraf nyata 10 %

Dari table diatas, maka persamaan yang didapat adalah:

$$\text{LOGGINI} = 317762.5 - 4.5852\text{LOGPDRB} + \varepsilon$$

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai β yang didapat sebesar -4,585 Artinya peningkatan PDRB sebesar 1 persen akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 4,585 persen (Tabel 3). Terjadinya penurunan ketimpangan pendapatan ini karena pertumbuhan ekonomi yang dicapai di kawasan Mebidangro dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok penduduk miskin dan tidak miskin walaupun mungkin jumlahnya tidak besar. Hasil ini bertentangan dengan yang didapat oleh Lin (2003) dan hasil penelitian Hidayat dan Patunru (2007). Mereka menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Namun hampir sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Kuznets (1955) yang menghasilkan ada suatu hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan, yang kemudian dikenal dengan hipotesis kurva U terbalik (*Inverted U-curve Hypothesis*).

Sektor perekonomian untuk kawasan Mebidangro juga didominasi oleh sektor yang menjadi lapangan pekerjaan sebagian besar masyarakat Mebidangro. Pada tahun 2011, dari total PDRB Mebidangro yang sebesar Rp.152,07 triliun, 57,72 persen disumbangkan oleh sektor service atau sekitar Rp.88,28 triliun, sektor *manufacture* berkontribusi sebesar 33,70

persen atau sekitar Rp.51,25 triliun, dan sisanya disumbangkan oleh sektor *agriculture* (pertanian). Sehingga ada keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dengan tingkat pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Artinya, apa yang dihasilkan dari pembangunan perekonomian di kawasan Mebidangro, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum, yang menyebabkan pemerataan distribusi pendapatan sekaligus menurunkan ketimpangan pendapatan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan

Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan dihitung dengan model yang dikembangkan oleh Wodon (1999) sebagai berikut:

$$\log P_{it} = \omega_i + \gamma_i \log Y_{it} + \delta \log G_{it} + v_{it} \dots (2)$$

Model yang digunakan adalah model double log, sehingga parameter γ yang didapat melambangkan elastisitas kemiskinan bruto terhadap pertumbuhan ekonomi (*gross elasticity of poverty to growth*). Sedangkan δ yang di dapat melambangkan elastisitas kemiskinan bruto terhadap ketimpangan pendapatan (*gross elasticity of poverty to inequality*). Jika nilai γ dan δ bertanda positif, artinya peningkatan PDRB konstan dan indeks Gini sebesar 1 persen akan meningkatkan kemiskinan sebesar γ dan δ persen.

Model 2 diregresi dengan menggunakan model *fixed effect*, dengan *weighting cross section weights* dan *white heteroscedasticity*. Model dengan *fixed effect* dipilih setelah melalui pengujian yang menyimpulkan bahwa model dengan *individual effect* lebih baik daripada dengan *common effect* (Uji F). Pengujian dengan uji Hausman juga menyimpulkan bahwa *fixed effect* lebih baik daripada *random effect*. Sedangkan *weighting* dengan *cross section weights* dan *white heteroscedasticity* karena model *fixed effect* mengandung heteroskedastisitas.

Tabel 4. Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	546966.4	45551.28	12.00771	0.0000
LOGPDRB?	-0.121986	0.079642	-1.5317**	0.1377
LOGGINI?	-0.235743	0.172457	-1.3670**	0.1833
R-squared	0.976323			
Adjusted R-squared	0.971769			
S.E. of regression	7285.448			
F-statistic	214.4189*			
Prob(F-statistic)	0.000000			

* Signifikan pada taraf nyata 1 %

** Tidak Signifikan

Berdasarkan Tabel 4, maka persamaan yang didapat adalah:

$$\text{LOGPMISKIN} = 546966.4 - 0.121986\text{LOGPDRB} - 0.235743\text{LOGGINI} + \varepsilon$$

Dari hasil pengolahan didapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan menurunkan kemiskinan dengan nilai elastisitas -0,122. Pertumbuhan ini akan meningkatkan pendapatan per kapita, pendapatan per kapita yang meningkat berarti penduduk miskin akan berkurang, namun secara statistik tidak signifikan. Hal yang sama juga terjadi pada ketimpangan pendapatan. Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan berhubungan negatif dengan kemiskinan, artinya setiap penurunan tingkat ketimpangan sebesar 1 persen maka kemiskinan akan meningkat sebesar persen 0,236.

Hasil pengolahan diatas menunjukan bahwa hubungan antara variabel tidak bebas (kemiskinan) dengan variabel bebas (pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan) tidak signifikan secara statistik. Untuk lebih meyakinkan lagi, penulis melakukan simulasi pengolahan data untuk mendapatkan minimal satu variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas yaitu dengan menambahkan data *time series* tiga tahun kebelakang hingga series datanya menjadi 2001-2011, namun hasil yang diperoleh juga tidak signifikan. Selanjutnya dilakukan juga

pengolahan dengan mengurangi data *cross section* dengan menghilangkan data Kabupaten Karo, namun jumlah data pengamatannya masih memenuhi syarat minimal, dan hasil yang diperoleh juga tidak ada variabel bebas yang berpengaruh signifikan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dihitung dengan model yang dikembangkan oleh Wodon (1999) sebagai berikut:

$$\lambda = \gamma + (\beta \times \delta) \dots\dots\dots (3)$$

Parameter γ melambangkan elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi ketika distribusi pendapatan tidak berubah. Parameter δ melambangkan elastisitas kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan. Kemudian dapat di hitung parameter λ , yaitu elastisitas netto kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi (*nett elasticity of poverty to growth*).

Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan secara bersama-sama terhadap kemiskinan ditentukan oleh nilai elastisitas netto kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi (λ). Nilai ini diperoleh dengan memperhitungkan pengaruh langsung dan tidak langsung variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.

Tabel 5. Dekomposisi pengaruh pertumbuhan ekonomi netto terhadap kemiskinan

Efek Pertumbuhan Ekonomi (γ)	Efek Ketimpangan Pendapatan ($\beta \times \delta$)	Elastisitas Netto Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (λ)
-0,1224986	1,0809262	0,9584276

Berdasarkan data pada Tabel 5, nilai elastisitas netto kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi (λ) sebesar 0,958. Kemiskinan seharusnya turun sebesar 0,122 persen jika ada pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen, namun karena adanya efek ketimpangan pendapatan, maka kemiskinan naik menjadi sebesar 0,958 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa efek peningkatan

ketimpangan pendapatan yang terjadi bukan hanya mengurangi keefektifan dari pengaruh pertumbuhan ekonomi, namun malah menaikkan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada periode tersebut mengurangi ketimpangan pendapatan, namun pengurangan ketimpangan pendapatan tersebut justru meningkatkan kemiskinan.

Pro Poor Growth Index

Indeks *pro poor growth* (PPGI) dihitung dengan rumus sebagai berikut (Kakwani dan Pernia, 2000):

$$\phi = \frac{\lambda}{\gamma} \dots\dots\dots(4)$$

Hasil penghitungan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa λ bernilai 0,9584276 sedangkan γ bernilai -0,1224986 sehingga:

$$\phi = \frac{0,9584276}{-0,1224986} = -7,823988$$

Berdasarkan kriteria Kakwani dan Pernia (2000), hasil ϕ sebesar -7,823988 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kawasan Mebidangroanti *poor* (*anti poor growth*). Jadi meskipun pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu menurunkan ketimpangan pendapatan namun tidak *pro* kepada pengentasan kemiskinan. Salah satu penyebabnya diduga karena pada periode 2004-2011 pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang wilayah perkotaan yaitu Kota Medan dan Binjai justru menaikkan angka kemiskinan di daerah tersebut.

Analisis Pengentasan Kemiskinan

Untuk menguji efek pertumbuhan ekonomi sektoral terhadap perubahan dalam kemiskinan, persamaan yang diestimasi adalah:

$$\log P_{it} = a + b_j \log H_{jit} Y_{jit} + c \log N_{it} + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

Model diatas diregresi dengan menggunakan model *fixed effect*, dengan *weighting cross section weights* dan *white heteroscedasticity*. Model dengan *fixed effect* dipilih setelah melalui pengujian yang menyimpulkan bahwa model dengan *individual effect* lebih baik daripada dengan *common effect* (Uji F). Pengujian dengan uji Hausman tidak dilakukan karena model *random effect* tidak dapat dikeluarkan sehingga yang dipilih adalah model *fixed*

effect. Sedangkan *weighting* dengan *cross section weights* dan *white heteroscedasticity* karena model *fixed effect* mengandung heteroskedastisitas.

Tabel 6. Pengaruh pertumbuhan ekonomi sektoral dan pertumbuhan penduduk terhadap pengentasan kemiskinan

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2216965.	988662.9	2.2424	0.0371
LOGSEKTOR1'	-3.119106	1.068568	-2.9189	0.0088
LOGSEKTOR2'	-0.276120	0.227375	-1.2144	0.2395
LOGSEKTOR3'	-1.372622	2.336703	-0.5874	0.5638
LOGSEKTOR4'	-2.212409	1.589037	-1.3923	0.1799
LOGSEKTOR5'	4.468715	2.159173	2.0696	0.0524
LOGSEKTOR6'	-0.728821	0.564688	-1.2907	0.2123
LOGSEKTOR7'	-1.002778	0.958339	-1.0464	0.3085
LOGSEKTOR8'	0.112688	0.331854	0.3396	0.7379
LOGSEKTOR9'	0.839849	1.283564	0.6543	0.5208
R-squared	0.99269			
Adjusted R-squared	0.98807			
F-statistic	215.004			
Prob (F-statistic)	0.00000			

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berhubungan negatif dengan jumlah penduduk miskin. Namun perlu dikaji lebih lanjut sektor-sektor apa saja yang dominan dalam pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan Table 6, maka persamaan yang didapat adalah:

$$\begin{aligned} \text{LOGPMISKIN} = & 2216965 - \\ & 3.119106 \text{LOGSEKTOR1} - \\ & 0.276120 \text{LOGSEKTOR2} - \\ & 1.372622 \text{LOGSEKTOR3} - \\ & 2.212409 \text{LOGSEKTOR4} + \\ & 4.468715 \text{LOGSEKTOR5} - \\ & 0.728821 \text{LOGSEKTOR6} - \\ & 1.002778 \text{LOGSEKTOR7} + \\ & 0.112688 \text{LOGSEKTOR8} + \\ & 0.839849 \text{LOGSEKTOR9} + \\ & \varepsilon \end{aligned}$$

Data yang dihasilkan menunjukan bahwa sektor-sektor pertumbuhan ekonomi yang mengurangi kemiskinan terjadi pada 6 sektor, yaitu: sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor angkutan dan komunikasi. Sedangkan pertumbuhan

ekonomi pada sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa justru meningkatkan kemiskinan.

Hal ini sejalan dengan temuan Siregar dan Wahyuniarti (2007), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, peningkatan *share* sektor pertanian dan sektor industri memberikan pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin walaupun dengan pengaruh yang relatif kecil. Demikian juga dengan penemuan Kakwani (2001) untuk studi kasus di Philipina. Pengurangan tingkat kemiskinan di Philipina lebih banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor pertanian, diikuti sektor jasa dan industri

Nilai koefisien PDRB sektor pertanian sebesar -3,119 berarti setiap kenaikan 1 persen PDRB sektor pertanian akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 3,119 persen, dengan asumsi *ceteris paribus*. Sektor pertambangan dan penggalian mempunyai elastisitas sebesar -0,276 yang berarti setiap kenaikan 1 persen PDRB sektor pertambangan dan penggalian akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,276 persen. Sektor industri pengolahan mempunyai elastisitas -1,373 yang berarti setiap kenaikan 1 persen PDRB sektor industri pengolahan akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,373 persen.

Nilai koefisien PDRB sektor listrik, gas dan air bersih sebesar -0,212 berarti setiap kenaikan 1 persen PDRB sektor tersebut akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,212 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai elastisitas sebesar -0,729 yang berarti setiap kenaikan 1 persen PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,729 persen, sedangkan sektor angkutan dan komunikasi mempunyai elastisitas -1,003 yang berarti setiap kenaikan 1 persen PDRB sektor angkutan dan komunikasi akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,003 persen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di kawasan Mebidangro

berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan secara bersama-sama dengan melihat nilai elastisitas netto kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi menurunkan kemiskinan tetapi ketimpangan pendapatan menjadi penghambat atau mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan.

2. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Mebidangro selama tahun 2004-2011 bersifat tidak pro kemiskinan (*anti poor*) yang ditandai dengan angka indeks *pro-poor growth* sebesar -7,824.
3. Sektor-sektor yang berpengaruh dominan dalam pengentasan kemiskinan adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor angkutan dan komunikasi.

SARAN

1. Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu disesuaikan dengan dinamika perekonomian di kawasan Mebidangro yang merupakan kawasan khusus metropolitan.
2. Diharapkan kepada pemerintah dalam rangka kebijakan pengentasan kemiskinan dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin terutama menggunakan strategi pertumbuhan ekonomi dan permasalahan pendidikan dan kesehatan.
3. Strategi pembangunan yang dilakukan perlu dibuat menjadi *pro-poor* dengan cara memberi akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang lebih luas, sehingga penduduk miskin bisa berpartisipasi dalam pembangunan dan mendapatkan manfaatnya.
4. Peningkatan produktivitas sektor pertanian, industri, perdagangan, dan sektor-sektor lainnya yang dominan terhadap pengentasan kemiskinan memiliki implikasi yang luas dalam menurunkan angka kemiskinan.

5. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data yang lebih lengkap dan *up to date* dengan menambahkan series data yang lebih panjang, variabel-variabel yang lebih rinci dan komprehensif serta daerah penelitian diperbanyak, sehingga hasilnya akan lebih baik.

DAFTAR RUJUKAN

- [ADB] Asian Development Bank. 1999. *Fighting Poverty in Asia and the Pacific: The Poverty Reduction Strategy*. Manila: Asian Development Bank.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota*. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. 2012. *Sumatera Utara Dalam Angka 2012*. Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara.
- 2012. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara 2007-2011*. Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Bourguignon F. 2004. *The Poverty-Growth-Inequality Triangle*. Washington: World Bank.
- Chenery HB, Ahluwalia MS, Bell CLG, Duloy JH, Jolly R. 1974. *Redistribution with Growth: Policies to Improve Income Distribution in Developing Countries in the Context of Economic Growth*. Oxford: OxfordUniversity Press.
- Glaeser EL. 2006. Inequality. Di dalam Barry R Weingast BR, Wittman DA, editor. *The Oxford Handbook of Political Economy*. New York: Oxford University Press Inc.
- Gujarati DN. 2004. *Basic Econometrics 4th Edition*. New York: McGraw Hill.
- Harniati. 2007. Tipologi kemiskinan dan kerentanan berbasis agro ekonomi dan implikasinya pada kebijakan pengurangan kemiskinan [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Hidayat S, Patunru AA. 2007. Pertumbuhan ekonomi, ketidakmerataan pendapatan dan kemiskinan: estimasi parameter elastisitas kemiskinan tingkat provinsi di Indonesia tahun 1996-2005. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hajiji, Ajid. 2010. Pertumbuhan ekonomi, ketidakmerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2002-2008 [Tesis]: Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Kakwani N, Pernia EM. 2000. What is pro-poor growth?. *Asian Development Review* 18:1, 1-16.
- Kuznets S. 1955. Economic growth and income inequality. *The American Economic Review* 45: 1-28.
- Lin BQ. 2003. Economic growth, income inequality, and poverty reduction in people's republic of china. *Asian Development Review* 20:105-124.
- Michael P. Todaro, 2000, *Economic Development*, Seventh Edition, Ney York University, Addison Mesley
- Nanga M. 2006. Dampak desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di indonesia: suatu analisis simulasi kebijakan [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Ravallion M, Datt G. 1996. How important to india's poor is sektoral composition of economic growth?. *The World Bank Economic Review* 10: 1-25.
- 2005. A poverty-inequality trade-off. *Journal of Economic Inequality* 3: 169-181.
- 2006. Inequality is bad for the poor. *World Bank Policy Research Working Paper* 3677.
- Robinson S. 1976. Sources of growth in less developed countries. *Quarterly Journal of Economics* 85:391-408.
- Siregar, Hermanto dan Dwi Wahyuniarti. 2007. Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. IPB dan Brighten Institute.

- Sen A. 1985. A sociological approach to the measurement of poverty: a reply to professor peter townsend. *Oxford Economic Papers* 37: 669-676.
- , 1995. The political economy of targeting. Di dalam Van de Walle D, Nead K, editor. *Public Spending and The Poor*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Tambunan TH. 2003. *Perekonomian Indonesia: Beberapa Permasalahan Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro MP, Smith SC. 2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan* (Alih Bahasa oleh Haris Munandar dan Puji A.L.). Jakarta: Erlangga.
- Trisna I. 2005. Strategi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif di kabupaten bengkalis [tesis]. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Warr P. 2000. Poverty and economic growth: the asian experience. *Asian Development Review* 18: 131 – 147.
- , 2006. Poverty and growth in southeast asia. *ASEAN Economic Bulletin* 23: 279 – 302.
- Wodon QT. 1999. Growth, poverty, and inequality: a regional panel for Bangladesh. *Policy Research Working Paper* 2072. Washington: World Bank.